

TRADE AND INDUSTRY BRIEF

Mohamad D. Revindo, Ph.D. (revindo@lpem-feui.org)
Yeremia Natanael, S.E. (yeremia.natanael@lpem-feui.org)

Neraca perdagangan Indonesia pada Oktober 2018 mencatat defisit USD 1,82 miliar, yang sebagian besarnya dipicu oleh defisit neraca migas. Secara kumulatif, neraca perdagangan non-migas Indonesia sepanjang Januari-Oktober 2018 mencatat surplus USD 5,2 miliar tetapi belum mampu menutupi defisit neraca migas sebesar USD 10,7 miliar pada periode yang sama.

Trade and Industry Brief edisi November ini memberikan perspektif singkat terhadap perkembangan ekspor dan impor Indonesia per Oktober 2018, meliputi perkembangan nilai, volume, harga, jenis produk, provinsi asal dan negara tujuan. Edisi ini juga menyajikan perkembangan peran industri pengolahan (dari sisi produksi) dan peran ekspor barang dan jasa (dari sisi pengeluaran) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada Triwulan III 2018. Selain itu, edisi ini juga menyajikan tinjauan singkat atas perkembangan kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), terutama dalam hal investasi pada industri pengolahan serta potensi produk yang dikembangkan dalam memperkuat ekspor nasional dan rantai pasok industri domestik. Data dan informasi dihimpun dari Berita Resmi Statistik BPS, Statistik Ekonomi dan Keuangan Bank Indonesia, *ITC Trademap* dan berbagai sumber lainnya.

A. Ringkasan Angka Penting

1. Ekspor dan Impor

Neraca perdagangan:

- ♦ Total: defisit USD 1,82 miliar (Okt '18); defisit USD 5,51 miliar (Jan-Okt '18)
- ♦ Sektor Migas: defisit USD 1,43 miliar (Okt '18); defisit USD 10,74 miliar (Jan-Okt '18)
- ♦ Sektor Nonmigas: defisit USD 0,39 miliar (Okt '18); surplus USD 5,22 miliar (Jan-Okt '18)

Harga produk (*Terms-of-trade*):

- ♦ Perubahan harga rata-rata produk ekspor: -5,08% (Okt '18 *m-to-m*), -6,27% (Okt '18 *y-on-y*)
- ♦ Perubahan harga rata-rata produk impor: -2,32% (Okt '18 *m-to-m*), +14,50% (Okt '18 *y-on-y*)

Pertumbuhan nilai ekspor:

- ♦ Total: +5,87% (Okt '18 *m-to-m*); +3,59% (Okt '18 *y-on-y*); +8,84% (Jan-Okt '18 *y-on-y*)
- ♦ Sektor Migas: +15,18% (Okt '18 *m-to-m*); -0,44% (Okt '18 *y-on-y*); +9,88% (Jan-Okt '18 *y-on-y*)
- ♦ Sektor Nonmigas: +4,99% (Okt '18 *m-to-m*); +4,03% (Okt '18 *y-on-y*); +8,73% (Jan-Okt '18 *y-on-y*)

Komposisi ekspor Nonmigas Jan-Okt '18:

- ♦ Berdasarkan sektor: Industri pengolahan (72,33%), Pertambangan dan lainnya (16,37%), Pertanian (1,87%)
- ♦ Berdasarkan produk utama: Bahan bakar mineral (15,05%), Kendaraan dan bagiannya (4,58%), Perhiasan dan permata (3,59%), Bijih, kerak, dan abu logam (3,32%), Alas kaki (3,07%)

Perkembangan nilai impor:

- ♦ Total: +20,60% (Okt '18 *m-to-m*); +23,66% (*y-on-y*); +23,37% (Jan-Okt '18 *y-on-y*)
- ♦ Sektor Migas: +26,97% (Okt '18 *m-to-m*); +31,78% (*y-on-y*); +27,72% (Jan-Okt '18 *y-on-y*)
- ♦ Sektor Nonmigas: 19,42% (Okt '18 *m-to-m*); +22,17% (*y-on-y*); +22,58% (Jan-Okt '18 *y-on-y*)

Negara tujuan utama ekspor Nonmigas Jan-Okt '18:

- ♦ Tiongkok (15,14%), Amerika Serikat (10,78%), Jepang (10,09%), India (8,36%) dan Singapura (5,43%)

Komposisi impor Jan-Okt '18:

- ♦ Berdasarkan penggunaan: Bahan baku dan penolong (75,09%), Barang modal (15,78%), barang konsumsi (9,13%)
- ♦ Berdasarkan produk utama: Mesin dan pesawat mekanik (16,94%), Mesin dan peralatan listrik (13,59%), Besi dan baja (6,13%), Plastik dan barang dari plastik (5,78%), Ampas/sisa industri makanan (1,98%)

2. Kontribusi Ekspor dan Industri Pengolahan terhadap PDB

Kontribusi terhadap PDB Q3 '18:

- ♦ Kontribusi industri pengolahan (sisi produksi): 19,66%
- ♦ Kontribusi ekspor barang dan jasa (sisi pengeluaran): 22,14%

Laju pertumbuhan PDB:

- ♦ Total: 3,09% (Q3 '18 *q-to-q*); 5,17% (Q3 '18 *y-on-y*); 5,17% (Q1-Q3 '18 terhadap Q1-Q3 '17)
- ♦ Industri pengolahan: 2,57% (Q3 '18 *q-to-q*); 4,33% (Q3 '18 *y-on-y*); 4,24% (Q1-Q3 '18 terhadap Q1-Q3 '17)

Kontribusi terhadap pertumbuhan PDB Q3 '18 (*y-on-y*):

- ♦ Industri pengolahan (sisi produksi): 0,91%
- ♦ Ekspor barang dan jasa (sisi pengeluaran): 1,64%

B. Ringkasan Kinerja dan Prospek Perdagangan dan Industri

1. Neraca Perdagangan, Volume Perdagangan dan Harga Komoditas

Neraca perdagangan Indonesia pada Oktober 2018 mencatat defisit sebesar USD 1,82 miliar. Angka defisit ini merupakan nilai defisit terbesar kedua sepanjang periode Januari-Oktober 2018, dimana nilai defisit terbesar terjadi pada Juli 2018 sebesar USD 2 miliar. Defisit neraca perdagangan pada Oktober 2018 lalu disebabkan baik oleh defisit pada neraca migas maupun non-migas, masing-masing sebesar USD 1,43 miliar dan USD 0,39 miliar.

Defisit neraca perdagangan pada Oktober 2018 bukan disebabkan oleh menurunnya kinerja ekspor, tapi lebih banyak oleh melonjaknya nilai impor. Jika dibandingkan dengan September 2018, ekspor non-migas pada Oktober mengalami kenaikan sebesar USD 0,68 miliar atau setara dengan 4,99%, tetapi pada saat yang sama impor non-migas mencatatkan kenaikan yang lebih besar, yaitu USD 2,39 miliar atau setara dengan 19,42%. Demikian pula nilai ekspor migas Oktober mengalami peningkatan sebesar 15,18% namun pada saat yang sama nilai impornya meningkat sebanyak 26,97% dibandingkan dengan September.

Untuk melihat kinerja neraca perdagangan lebih jauh, perlu ditelaah secara lebih spesifik apakah perubahan nilai ekspor dan impor disebabkan oleh adanya perubahan pada volume perdagangan, perubahan pada harga komoditas yang diperdagangkan, atau gabungan dari keduanya. Kenaikan nilai ekspor pada Oktober 2018 disebabkan oleh naiknya volume komoditas yang diekspor sebesar 11,54%, meskipun harga rata-rata komoditas yang diekspor menurun sebanyak 5,08% dibandingkan September. Adapun peningkatan nilai impor Oktober 2018 disebabkan oleh naiknya volume impor sebesar 23,47% dan kenaikan harga rata-rata komoditas impor non-migas sebesar 2,32% jika dibandingkan September. Dengan demikian, defisit neraca perdagangan Oktober 2018 lebih disebabkan oleh kenaikan volume impor yang lebih tinggi dari kenaikan ekspor, serta dibarengi oleh penurunan harga rata-rata komoditas ekspor.

Secara kumulatif selama periode Januari-Oktober 2018 neraca perdagangan non-migas masih mencatatkan surplus USD 5,22 miliar. Akan tetapi surplus tersebut tidak dapat mengimbangi defisit neraca migas sebesar USD 10,74 miliar sehingga neraca perdagangan secara total masih mengalami defisit USD 5,51 miliar. Kondisi ini berlawanan jika dibandingkan dengan neraca perdagangan pada periode yang sama di 2017 yang

secara total mencatatkan surplus USD 11,86 miliar. Meskipun akumulasi nilai ekspor migas dan non-migas sepanjang Januari-Oktober 2018 mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 8,73% dan 9,88% dibandingkan periode yang sama pada 2017, namun peningkatan ekspor ini tidak dapat mengimbangi impor migas dan non-migas yang pada periode tersebut juga mencatat kenaikan sebesar masing-masing 27,72% dan 22,58%.

Nilai tukar Rupiah yang mengalami pelemahan di kisaran 2% pada Oktober 2018 dan 10,65% sepanjang Januari-Oktober 2018 sangat mungkin berkontribusi terhadap peningkatan ekspor, namun tidak serta merta mengurangi laju impor. Di sisi impor, pelemahan Rupiah justru dapat membebani industri domestik yang masih bergantung pada input impor, dimana kontribusi bahan baku dan penolong serta barang modal terhadap total impor barang sepanjang Januari-Oktober 2018 mencapai 90,87%.

2. Kinerja Ekspor

Total nilai ekspor Indonesia pada Oktober 2018 tercatat sebesar USD 15 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 5,87% dibandingkan September 2018 dan 3,59% jika dibandingkan dengan Oktober 2017. Secara kumulatif, nilai ekspor sepanjang Januari-Oktober 2018 mengalami peningkatan sebesar 8,84% jika dibandingkan dengan periode yang sama di 2017.

Komposisi ekspor selama periode Januari-Oktober 2018 lebih didominasi oleh komoditas non-migas (90,57%) dibandingkan komoditas migas (9,43%). Komoditas utama ekspor migas adalah gas alam dan minyak mentah, sedangkan hasil olahan minyak dan gas masih sangat terbatas. Kontributor utama ekspor non-migas adalah komoditas industri pengolahan (72,33%) disusul pertambangan (16,37%) dan pertanian (1,87%).

Berdasarkan kelompok barangnya, kontributor utama ekspor non-migas sepanjang Januari-Oktober adalah HS 27: Bahan bakar mineral (15,05%) yang didominasi batubara dan gas alam, disusul HS 87: Kendaraan dan bagiannya (4,58%). Kelompok komoditas berikutnya adalah HS 71: Perhiasan dan permata (3,59%), dan posisi ke-empat adalah HS 26: Bijih, kerak, dan abu logam (3,49%) yang sebagian besar berupa bijih dan konsentrat tembaga. Pada posisi ke-lima adalah HS 64: Alas kaki (3,07%). Adapun komoditas ekspor utama yang mengalami kenaikan ekspor terbesar dibandingkan September 2018 adalah Perhiasan dan permata (HS 71) dengan tingkat pertumbuhan sebesar 82,24%.

Negara yang menjadi tujuan ekspor utama komoditas non-migas Indonesia pada Oktober 2018 adalah Tiongkok, dengan komoditas utama berupa lignit, batubara dan minyak kelapa sawit. Negara tujuan ekspor utama berikutnya secara berturut-turut adalah Amerika Serikat, Jepang, India dan Singapura. Komposisi lima negara tujuan utama ini tidak berubah sepanjang Januari-Oktober 2018 dimana secara kumulatif tujuan ekspor utama Indonesia adalah Tiongkok (15,14%), Amerika Serikat (10,78%), Jepang (10,09%), India (8,36%) dan Singapura (5,43%). Proporsi nilai ekspor ke lima negara tujuan utama tersebut selama periode Januari-Oktober 2018 mencapai 49,80% dari total nilai ekspor, sementara proporsi nilai ekspor ke 13 negara tujuan utama pada periode ini mencapai 71,51% dari total nilai ekspor. Tingkat konsentrasi negara tujuan utama ekspor Indonesia ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan periode Januari-September 2017 dimana lima dan 13 negara tujuan utama secara berturut-turut menyumbang 49,37% dan 70,57% dari total nilai ekspor barang.

Ditinjau dari provinsi asalnya, lima provinsi dengan sumbangan ekspor barang terbesar sepanjang Januari-Oktober 2018 adalah Jawa Barat (16,87 persen), Jawa Timur (10,72 persen), Kalimantan Timur (10,21 persen), Riau (8,98%) dan Kepulauan Riau (6,3%). Kelimanya menyumbangkan lebih dari separuh dari seluruh nilai ekspor barang nasional.

3. Perkembangan Impor

Pada Oktober 2018, nilai impor Indonesia tercatat sebesar USD 17,62 miliar, meningkat 20,60% dibandingkan dengan September 2018, dan naik 23,66% jika dibandingkan dengan Oktober 2017. Kenaikan ini didorong oleh volume impor pada Oktober 2018 yang mencapai 15,88 juta ton, mengalami kenaikan sebesar 3,02 juta ton dibandingkan September dan 1,18 juta ton dibandingkan Oktober 2017. Secara kumulatif, nilai impor sepanjang Januari-Oktober 2018 mencapai USD 156,40 miliar, meningkat 23,37% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2017.

Kontributor utama impor Indonesia sepanjang periode Januari-Oktober 2018 adalah komoditas non-migas yang menyumbang 84,04% dari total nilai impor, sedangkan komoditas migas yang sebagian besarnya berupa hasil olahan minyak bumi berkontribusi sebanyak 15,89%. Berdasarkan penggunaannya, sebagian besar impor Indonesia pada periode Januari-Oktober 2018 digunakan untuk bahan baku dan penolong (75,09%), selanjutnya untuk barang modal (15,78%), dan hanya sebagian kecil digunakan untuk konsumsi langsung (9,13%).

Secara lebih spesifik berdasarkan komoditasnya, kontributor utama impor non-migas adalah HS 84: Mesin dan pesawat mekanik (16,94%) untuk kegunaan *printing*, mesin piston dan mesin pendingin. Posisi ke-dua adalah HS 85: Mesin/peralatan listrik (13,59%), dan peringkat ketiga adalah HS 72: Benda dari besi dan baja (6,13%). Posisi ke-empat adalah HS 39: Plastik dan barang dari plastik (5,78%), dan kelompok komoditas impor ke-lima terbesar adalah HS 23: Ampas/sisa industri makanan (1,98%). Adapun komoditas impor dengan peningkatan terbesar adalah Mesin dan pesawat mekanik (HS 84) dengan tingkat pertumbuhan Oktober sebesar 16,65% dibandingkan September 2018.

4. Kontribusi Ekspor dan Industri Pengolahan Terhadap PDB

PDB Indonesia pada Q3-2018 tercatat sebesar Rp 3.385,6 triliun (harga berlaku) atau Rp 2.684,2 triliun (harga konstan 2010). Dari sisi produksi, industri pengolahan berkontribusi sebesar 19,66%, paling besar dibanding 16 lapangan usaha lainnya. Dari sisi pengeluaran, ekspor barang dan jasa menyumbang 22,14%, lebih rendah dari sumbangan konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto.

PDB Indonesia pada Q3-2018 mencatat pertumbuhan sebesar 3,09% (*q-to-q*) dan 5,17% (*y-on-y*). Pada saat yang sama PDB industri pengolahan mencatat pertumbuhan sebesar 2,57% (*q-to-q*) dan 4,33% (*y-on-y*). Secara kumulatif, sepanjang Q1-Q3 2018 PDB Indonesia mencatat pertumbuhan 5,17% terhadap Q1-Q3 2017. Adapun pada periode yang sama PDB industri pengolahan tercatat tumbuh sebesar 4,24%. Dengan kata lain, pertumbuhan industri pengolahan masih berada di bawah pertumbuhan perekonomian secara keseluruhan.

Dari sisi produksi, berdasarkan lapangan usaha secara *y-on-y* sumbangan industri pengolahan terhadap pertumbuhan PDB pada Q3-2018 mencapai 0,91%. Adapun dari sisi pengeluaran, sumbangan ekspor barang dan jasa terhadap pertumbuhan PDB pada Q3-2018 tercatat sebesar 1,64%, lebih rendah dari kontribusi konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto.

C. Fokus: Meninjau Kembali Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus

Sejak krisis keuangan dunia 2007-2008 perekonomian Indonesia mengalami beberapa tantangan, baik disebabkan secara langsung oleh perubahan struktural di dalam negeri maupun secara tidak langsung oleh dinamika perekonomian dunia. Pertama, kondisi ekonomi global cenderung tidak menentu akibat mandeknya berbagai perundingan perjanjian perdagangan bebas regional dan multilateral yang belakangan ini diperburuk dengan perang dagang AS-Tiongkok. Kedua, pertumbuhan ekonomi cenderung melambat pada kisaran 4,9-5,1%. Ketiga, distribusi pendapatan individual cenderung membaik dengan nilai Koefisien Gini kurang dari 0,4 sejak 2016 (World Bank, 2018) tetapi ketimpangan antar wilayah masih terjadi dimana sekitar 58% PDB dihasilkan di Pulau Jawa (BPS, 2018). Keempat, terjadi perubahan struktur perekonomian dimana kontribusi dan pertumbuhan sektor industri pengolahan terus menurun (BPS, 2018).

Salah satu bentuk respon pemerintah atas berbagai tantangan perekonomian di atas adalah pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009. KEK menawarkan berbagai insentif fiskal dan kemudahan/fasilitas non-fiskal yang diharapkan dapat menarik bagi investor. Dalam perihal insentif fiskal, fasilitas yang ditawarkan oleh pemerintah meliputi *tax allowance*, *tax holiday*, PPN, PPnBM, fasilitas bea impor dan kepemilikan properti oleh asing. Adapun beberapa fasilitas non-fiskal yang ditawarkan pemerintah untuk menarik investasi di KEK diantaranya adalah kemudahan yang terkait dengan ketenagakerjaan, imigrasi, kepemilikan lahan, serta izin investasi.

Secara konseptual, pengembangan KEK memiliki beberapa tujuan. Pertama, mempercepat masuknya aliran investasi, baik domestik maupun asing. Kedua, penyebaran investasi ke berbagai wilayah, yang pada gilirannya mendorong pengembangan industri serta memberikan efek pengganda ekonomi ke daerah. Ketiga, meningkatkan nilai ekspor, khususnya ekspor non-migas. Keempat, meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk ekspor melalui hilirisasi rantai produksi. Kesemua hal tersebut pada akhirnya diharapkan mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperbaiki pemerataan antar wilayah dan meningkatkan daya saing perekonomian.

Saat ini terdapat sembilan KEK yang telah ditetapkan untuk industri pengolahan: KEK Sei Mangkei (Sumatera Utara) telah beroperasi sejak Januari 2015 dan diperuntukkan bagi industri pengolahan sawit, karet dan protein alternatif; KEK Palu (Sulawesi Tengah) untuk pengolahan nikel, biji besi dan kakao, beroperasi sejak

September 2017; KEK Bitung (Sulawesi Utara) untuk industri farmasi, kelapa dan perikanan, beroperasi sejak Mei 2018; KEK Morotai (Maluku Utara) untuk pengolahan perikanan, beroperasi sejak Juli 2018; KEK Tanjung Api-api (Sumatera Selatan) untuk pengolahan kelapa sawit, karet, petrokimia dan energi, beroperasi sejak Juli 2018; KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (Kalimantan Timur) untuk pengolahan kelapa sawit, kayu dan energi, beroperasi sejak Oktober 2018; KEK Arun Lhokseumawe (Aceh) untuk industri energi, petrokimia, kelapa sawit dan kayu, beroperasi pada semester II 2018; KEK Galang Batang (Kepulauan Riau) untuk pengolahan bauksit, beroperasi sejak Januari 2018; dan KEK Sorong (Papua Barat) untuk pengolahan nikel dan kelapa sawit, direncanakan siap menerima investasi pada Agustus 2019. Selain KEK tersebut, terdapat beberapa KEK lain yang difokuskan pada sektor pariwisata. Selain itu, terdapat pula setidaknya 80 lokasi lain yang saat ini masih dalam tahap pengusulan untuk diberikan status KEK.

Meskipun KEK menawarkan berbagai insentif dan kemudahan berinvestasi tetapi pada kenyataannya KEK tidak serta merta mudah menarik investor. Data Dewan Nasional KEK (2018) menunjukkan bahwa per Januari 2018 lalu di KEK Sei Mangkei (beroperasi sejak awal 2015) realisasi investasi baru mencapai 2,56% dari nilai yang ditargetkan di 2025, terlepas dari banyaknya investor yang menunjukkan minat dan komitmen. Selain itu, di KEK Palu (beroperasi sejak September 2017) realisasi investasi baru mencapai 0,09% dari target 2025 dan di KEK Galang Batang (beroperasi sejak Januari 2018) realisasi investasi baru mencapai 2,71% dari target 2023.

Terdapat beberapa tantangan untuk mempercepat masuknya investasi di KEK. Pertama, dalam beberapa kasus pengusul tidak mampu memenuhi tenggat waktu menyiapkan KEK sebelum menerima investasi. Pengusul harus mampu menyiapkan lahan, infrastruktur pendukung (listrik, bahan bakar, air, pengolahan limbah), dan perangkat pengendalian administrasi (kelembagaan dan sumber daya manusia) dalam 3 tahun, sebelum KEK dinyatakan beroperasi dan dapat menerima investasi (Dewan Nasional KEK, 2018).

Kedua, dalam beberapa kasus keunggulan geoekonomi dan geostrategi dari KEK belum cukup meyakinkan bagi investor (LPEM, 2018). Geoekonomi adalah kombinasi faktor ekonomi dan

geografi dimana investor KEK memiliki keuntungan lokasi untuk melakukan perdagangan internasional. Adapun geostrategi adalah kombinasi faktor geografi, ekonomi, demografi dan strategi yang memberikan peran tertentu pada suatu kawasan geografis. Sebagai contoh, perkembangan KEK Sei Mangkei terhambat karena kawasan tersebut belum terintegrasi dengan kawasan industri di sekitarnya seperti Kawasan Industri Kuala Tanjung (Darmastuti, 2018).

Ketiga, pemberian fasilitas fiskal dan non-fiskal masih memiliki kelemahan pada tingkat implementasi. Pengajuan insentif fiskal memerlukan prosedur yang cukup panjang dan waktu pengambilan keputusan yang cukup lama. Selain itu, belum terdapat kesepahaman dan koordinasi yang kuat antar lembaga pemerintah yang terlibat dalam pemberian insentif, meliputi Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Hukum dan HAM serta pemerintah daerah. Sebagai contoh, di KEK Sei Mangkei perubahan status lahan KEK dari hak guna usaha menjadi hak pengelolaan justru menimbulkan kenaikan tingkat pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah daerah (Ginting, Sembiring, Siregar dan Abduh, 2018).

Selain menarik dan memperbaiki penyebaran investasi, tujuan lain KEK adalah meningkatkan ekspor non-migas. Dalam hal ini berbagai produk yang akan dikembangkan di KEK umumnya memiliki potensi pasar ekspor yang tinggi. Sebagai contoh, data ekspor selama setidaknya sepuluh tahun terakhir (ITC, 2018) menunjukkan bahwa produk oleokimia turunan Kelapa Sawit (KEK Sei Mangkei), produk kimia olahan getah pinus (KEK Palu), amoniak (KEK Tanjung Api-api), bahan kimia berbasis batu bara (Maloy Batuta Trans Kalimantan), serta aluminium (KEK Galang Batang) memiliki daya saing yang tinggi di pasar internasional.

Selain produk yang berorientasi ekspor, investasi di KEK juga mengarah pada pemenuhan pasar domestik yang dapat menjadi substitusi impor. Sebagai contoh, produk protein alternatif (KEK Sei Mangkei), penyulingan minyak bumi (KEK Tanjung Api-api dan Maloy Batuta Trans Kalimantan), pupuk dan kantung semen (KEK Arun Lhokseumawe) memiliki potensi pasar domestik yang besar yang selama ini dipenuhi dari impor.

Selain investasi dan ekspor, tujuan lain KEK adalah peningkatan daya saing produk nasional melalui pemrosesan bahan mentah untuk memperpanjang rantai produksi/hilirisasi industri sekaligus memperkuat rantai pasok domestik. Dalam hal ini setidaknya terdapat dua catatan penting. Pertama, hilirisasi rantai produksi belum mengarah pada integrasi dari hulu sampai ke hilir, tetapi baru berupa penambahan satu atau dua rantai

produksi saja. Kedua, upaya peningkatan ekspor melalui KEK tidak selalu berjalan seiring dengan penguatan rantai pasok domestik.

Sebagai contoh, pengolahan mineral bauksit baru sebatas memenuhi UU No. 4 Tahun 2009 dengan melakukan satu tahap pengolahan dan pemurnian untuk kemudian diekspor dalam bentuk alumina. Adapun sebenarnya kebutuhan domestik akan alumina cukup besar, ditandai dengan impor yang meningkat dan neraca perdagangan hampir selalu defisit selama sepuluh tahun terakhir. Demikian pula hilirisasi getah pinus baru sebatas pengolahan menjadi resin dan terpentin yang berorientasi ekspor meskipun di pasar domestik rantai produksinya ke industri hilir masih panjang, terutama untuk pengembangan industri cat dan kimia. Sebagai akibatnya, meskipun produk yang dikembangkan di KEK akan mampu memperkuat ekspor non-migas tetapi belum tentu mampu memperkuat rantai pasok domestik serta mengurangi ketergantungan pada input impor.

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa KEK memiliki potensi mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan ekspor tetapi menghadapi tantangan dalam menarik investor dan belum memiliki arah yang kuat untuk memperkuat industri dalam negeri. Agar KEK dapat lebih efektif mencapai tujuannya diperlukan beberapa kebijakan. Pertama, perlu sinergitas dan koordinasi yang lebih kuat antar kementerian di tingkat pusat serta antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal pemberian insentif fiskal dan kemudahan investasi di KEK. Untuk KEK lain yang masih dalam tahap pengusulan, perlu dipertimbangkan aspek geoekonomi dan geostrategi dari lokasi KEK, mencakup kemudahan akses pengangkutan ekspor-impor, input bahan baku dan sumber daya manusia serta akses ke pasar domestik.

Untuk memperkuat industri dan rantai pasok domestik, perlu insentif lebih lanjut agar investor tidak sebatas melakukan satu tahap pengolahan dari bahan mentah untuk kemudian mengekspor. Diperlukan pemahaman yang lebih strategis bahwa peningkatan ekspor tidak semata peningkatan nilai atau volume dalam jangka pendek, melainkan juga peningkatan daya saing dan nilai tambah barang. Untuk produk yang dibutuhkan sebagai substitusi impor, perlu dipertimbangkan insentif bagi produsen di KEK untuk menjual produknya ke pasar domestik. Dengan cara ini industri domestik, sebagian diantaranya juga eksportir, akan berkurang ketergantungannya pada input impor.